

Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu

¹Ferdian Nugraha, ²Erik Pikri Setiadi, ³Tatsa Hasby Rahima, ⁴Andi Septiadi

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Kata kunci :

Demokrasi,
Pendidikan Politik,
Pemilu,
Polarisasi Sosial,
Politik Identitas,
Politisasi Agama,
Sistem Demokrasi,
Strategi Politik

Keywords:

Democracy,
Political Education,
Election
Social Polarization,
Identity Politics,
Politicization of Religion,
Democratic System,
Political Strategy

Email :

tasaarahima@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji fenomena serta dampak politik identitas dan politik agama dalam konteks pemilu. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana kedua fenomena ini berkontribusi terhadap demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana politik identitas mempengaruhi proses demokrasi dan bagaimana politik agama digunakan dalam strategi politik. Dengan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, analisis dokumen dan diskusi kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dan agama memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilu dan sering digunakan untuk merusak kepercayaan terhadap sistem demokrasi dengan mengeksploitasi sentimen masyarakat, bahkan berpotensi mempolarisasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya bahwa politik identitas memiliki dampak yang signifikan terhadap pilihan mereka dalam hidup. Pragmatisme masyarakat dan kurangnya pendidikan politik menjadi penyebab dari fenomena ini. Pembahasan menjelaskan bahwa krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan partisipasinya, kerentanan sosial dan ekonomi, serta pengaruh elite politik terhadap opini publik melalui media dan propaganda menggerogoti demokrasi secara negatif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah khusus, seperti pendidikan politik yang inklusif, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menegakkan integritas demokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memberikan informasi mengenai tantangan demokrasi dan, terlebih lagi, dengan menawarkan kerangka kerja untuk kebijakan inklusif yang mengurangi pengaruh politik identitas dan politik agama.

This study examines the phenomenon and impact of identity politics and religious politics in the context of elections. The main question asked is how these two phenomena contribute to democracy. The purpose of this study is to understand how identity politics affects the democratic process and how religious politics is used in political strategy. Using a quantitative research methodology, this research involves observation, interviews, document analysis and group discussions. The results of the study show that identity and religion politics have a significant impact on the electoral process and are often used to undermine trust in the democratic system by exploiting public sentiment, and even potentially polarizing society. The findings show that the majority of respondents believe that identity politics has a significant impact on their choices in life. Public pragmatism and lack of political education are the causes of this phenomenon. The discussion explained that the crisis of public trust in the political system and its participants, social and economic vulnerabilities, and the influence of political elites on public opinion through the media and propaganda negatively undermine democracy. Therefore, special measures, such as inclusive political education, are needed to increase public trust and uphold democratic integrity. The research contributes by providing information on the challenges of democracy and, moreover, by offering a framework for inclusive policies that reduce the influence of identity politics and religious politics.

Copyright © 2024 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Setiap menjelang pelaksanaan pemilu berbagai akrobatik politik muncul ke ranah politik, akrobatik salahsatunya melalui adu gagasan (Fachrudin, 2019). justru yang paling banyak ditemukan di lapangan adalah saling serang antar pendukung dari masing-masing calon Faktor

pemicunya bermacam-macam, mulai dari saling ejek antar pendukung hingga menusuk alat peraga pemilu dari pasangan-pasangan calon lainnya (Amruddin, 2020).

Secara teoritis hakikat pemilu adalah untuk membangun sistem demokrasi yang berkeadilan, sehingga semua pihak wajib menghormati beda pilihan (Kartiko, 2009) karena dengan berbeda-beda pilihan maka mesin demokrasi sudah benar-benar berjalan. Ada fakta menarik dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini. Bahwa teori demokrasi semakin tertinggal dari realitas berdemokrasi (Martha Arry Bainus Dudi Heryadi, 2015). Fenomena tersebut secara terang benderang tersaji melalui kampanye hitam yang tujuannya untuk menyerang pihak lawan secara verbal seperti membakar posko pemenangan, membakar bendera partai, dalam bentuk non verbal berupa teror dan ancaman-ancaman menjelang pelaksanaan pemilu hingga di hari penetapan pemenangan pemilu (Perdana, 2023).

Selain beberapa fakta di atas, politik identitas dan politisasi agama suatau tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam konteks pemilu sekarang dan akan datang (Perdana, 2023) Politik identitas mengacu pada praktik politik yang didasarkan pada karakteristik kelompok tertentu seperti etnis, agama, dan suku, ketiga kelompok tersebut menjadi aktor yang memiliki kemampuan mempengaruhi pemilihan dalam mengambil keputusan politik masing-masing (Yunus et al., 2023). Dalam konteks politik identitas masyarakat cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok identitas tertentu dan memilih berdasarkan afiliasi kelompok tersebut. Politik sering muncul dalam retorika politik, strategi kampanye, dan pembentukan koalisi politik. Hal ini mempengaruhi cara pemilihan dalam memilih calon dan partai politik serta mempengaruhi dinamika politik (Sahl & Mauluddin, 2024). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia (Perdana, 2023).

Tabel 1 perbedaan antara politik agama dan politisasi agama dalam konteks pemilu

Aspek	Politik Agama	Politisasi Agama
Definisi	Pemanfaatan nilai-nilai agama dalam praktik politik, tanpa merusak makna agama itu sendiri.	Penggunaan simbol atau isu agama untuk mencapai tujuan politik tertentu.
Tujuan Utama	Menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kebijakan atau tata kelola negara.	Mendapatkan dukungan suara dengan memainkan sentimen atau isu agama.
Dampak pada Masyarakat	Cenderung positif, memperkuat moral publik dan etika dalam politik.	Dapat memecah-belah masyarakat dan menimbulkan konflik identitas.
Contoh	Pembuatan kebijakan yang berdasarkan pada nilai-nilai agama (misalnya: undang-undang tentang larangan korupsi yang dipengaruhi ajaran agama).	Kampanye politik yang mengangkat isu sektarian untuk menarik pemilih dari kelompok tertentu.
Efek pada Pemilu	Meningkatkan partisipasi politik warga berdasarkan kesadaran nilai agama.	Mengurangi kualitas pemilu dengan memicu konflik dan mengganggu objektivitas pemilih.
Kritik	Dapat disalahgunakan jika agama dianggap sebagai panduan yang tunggal dan absolut dalam bernegara.	Dinilai sebagai manipulasi yang mengorbankan agama demi kepentingan politik sesaat.

Tabel 1 Dalam konteks pemilu, politik agama dan politisasi agama sering kali berada di area yang berbeda dalam tujuan dan dampaknya pada stabilitas sosial serta kesadaran politik masyarakat.

Secara realitas politik identitas di Indonesia menguat ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 (Sahalatua et al., 2018) pada pemilu tersebut pertarungan politik identitas begitu sangat terlihat, sehingga berdampak pada polarisasi dan konflik sosial di dalam masyarakat. Dinamika politik tersebut demikian sekarang subur kembali di beberapa tempat menjelang pilkada 2024 dan di khawatirkan dapat mengancam keutuhan masyarakat dan kesatuan bangsa.

Media sosial telah menciptakan realitas virtual di samping realitas aktual, yang membentuk polarisasi dalam persepsi dan nilai-nilai agama (Suryadi & Anwar, 2024).

Pemilu di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks, salah satunya politik identitas yang saat ini mempengaruhi berjalannya proses demokrasi. Pengaruh politik identitas terhadap pemilu, membangun sistem demokrasi yang murni tanpa adanya diskriminasi calon pemimpin mempunyai visi dan misi dalam membangun kemajuan bangsa, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpendapat maupun mengkritik kepada pemerintah adalah cara untuk kemajuan demokrasi yang terbuka. Hasil dari penelitian (Maruapey et al., 2024) dapat dilihat dari analisis yang telah penulis sampaikan menunjukkan bahwa politik identitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berlangsungnya pemilu.

Dari kondisi keperihatinan mengenai dinamika politik yang terjadi secara umum di Indonesia terutama berkaitan dengan kesadaran politik generasi muda bangsa yang minim memperoleh pendidikan politik (Fajar, 2014)

Fenomena yang terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia saat ini adalah menipisnya inklusivitas masyarakat di berbagai level kehidupan, sehingga menjadi persoalan bagi integrasi dan keutuhan berbangsa-bernegara (Wahyunengseh, 2011)

Teori yang kami pilih yaitu teori konflik sosial dalam perspektif teori Karl Marx, dimana kami berfokus pada perspektif sosiologis yang menekankan pada perbedaan kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan ketegangan dan pertentangan antara kelompok-kelompok sosial. Teori ini berpendapat bahwa konflik sosial merupakan pendorong utama perubahan sosial dan perkembangan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, alasan kami menggunakan metode tersebut adalah metode kuantitatif sangat baik untuk mengeksplorasi bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi fenomena politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu, teknik yang akan digunakan oleh kami yaitu, observasi partisipasi, mendalam menggali informasi melalui percakapan terbuka dengan responden diskusi kelompok terfokus, melakukan pengumpulan data dari orang-orang tertentu untuk mendapatkan pandangan yang beragam, kami juga terlihat dalam kegiatan penelitian ini kami menganalisis dokumen melalui makalah ini.

Penelitian ini akan mengambil beberapa narasumber melalui teknik wawancara diantaranya meliputi, untuk mengulik lebih mendalam mengenai permasalahan politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu, dan juga beberapa beberapa tokoh masyarakat yang akan kami wawancarai bagaimana pandangan masyarakat mengenai permasalahan tersebut, karena politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu sering menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, keduanya



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian dan sekaligus diberikan pembahasan yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel dan lain-lain yang membuat pembaca mengerti (Cartlidge, 2012). Pembahasan dapat dilakukan dalam beberapa sub bab.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan masyarakat umum, kami mendapatkan sudut pandang dan jawaban yang berbeda-beda, menurut pendapat kami setelah melihat jawaban hasil wawancara politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu kami menyatakan menjadi sebuah keniscayaan dan bahkan menjadi kewajaran bagi para politisi untuk mempermainkan atau menggunakan sebuah isu politik identitas tatkala berebut suara pemilih dengan dalih sikap dan kultur pragmatisme masyarakat, meskipun tentu hal ini mengandung banyak resiko dikemudian hari terutama menyoal polarisasi dan sentimen dikalangan masyarakat itu sendiri.

Selama ini fakta menunjukkan bahwa anggota partai politik baru butuh masyarakat ketika mereka membutuhkan tiket suara dari masyarakat, hal ini telah menyebabkan arah politik menjadi menjadi bewarna-warna, atau sudah ada yang kehilangan warna karena masyarakat tidak menaruh percaya pada partai politik atau calon politik yang telah diusung dulunya (Fitriyah, 2020). Karena sepanjang tahun dianggap tidak mewakili konstituen ketikasuk sudah duduk empuk di parlemen sebagai gambaran umum bahwa politik indonesia dibangun dari keberagaman budaya etnis, agama, dan suku bangsa yang kemudian menjadi ciri khas bangsa indonesia, sebab indonesia dengan kemajemukan yang dimiliki di satu sisi dihadapkan pada berbagai isu permasalahan dan tantangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi isu utama yang perlu ditangani secara serius oleh negara (Ishatono & Raharjo, 2016).

Dalam menghadapi kondisi para pemilih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih melalui pendidikan politik yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap informasi politik yang akurat agar dapat membantu pemilih menjadi cerdas, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sudah menjadi pemandangan umum menjelang pemilu tensi suhu politik di seluruh wilayah menjadi semakin memanas yang disebabkan oleh kompleksitas persoalan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, kompleksitas ini terkait langsung dengan agenda pemilu, dimana persaingan politik, retorika, strategi partai, serta calon peserta yang maju dalam gelanggang politik mencapai puncaknya, kondisi demikian ditandai oleh persaingan politik yang intensif antara partai-partai politik dan para kontestan yang dipercayakan oleh masing-masing partai, persaingan ini membawa dampak yang luar biasa terhadap peta politik nasional dan lokal.

Partai politik berlomba-lomba untuk memenangkan dukungan pemilih dan memperoleh kursi di lembaga legislatif serta memperebutkan posisi eksekutif di tingkat nasional maupun daerah.

Hasil deskriptif

Adapun data mengenai jenis kelamin responden masyarakat mengenai politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data berdasarkan jenis kelamin responden masyarakat

Jenis Kelamin	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	20	47,6%	47,6%	47,6%
Perempuan	22	52,3%	52,3%	100,0
Total	42	100,0	100,0	

Data mengenai usia responden disini, peneliti mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dari umur 17-25 tahun, 25-30 tahun. Adapun data mengenai usia responden politik identitas dan politisasi agama dalam konteks pemilu adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Data berdasarkan usia responden

Usia (Tahun)	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17-25	41	97,6%	97,6%	97,6%
30	1	2,3%	2,3%	100,0
Total	42	100,0	100,0	

Tabel 4. Tabel Kuisioner

No	Pernyataan	Setuju	Tidak setuju	Sangat setuju
1.	apakah besar pengaruh politik identitas terhadap pilihan anda dalam pemilu?	51,2%	29,3%	14,6%
2.	Menurut anda, apakah politik identitas sering digunakan dalam pemilu?	60%	25%	15%
3.	Apakah anda merasa politisasi yang menggunakan agama dalam kampanye lebih peduli pada rakyat?	40%	55%	5%
4.	apakah penting latar belakang agama sesorang politisi dalam menentukan pilihan anda?	40%	37,5%	20%
5.	Apakah menurut anda politik identitas dapat memecah belah masyarakat?	62,5%	17,5%	15%
6.	Meurut anda, apakah politik identitas sangat berdampak terhadap keharmonisan sosial di masyarakat?	60%	22,5%	15%

Pembahasan

Krisis Kepercayaan Terhadap Sistem Demokrasi

Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan (Kartiko, 2009).

Masyarakat akan dihadapkan dengan pemilu ditahun 2024 mendatang yang dimana pemilu menjadi faktor penting dalam proses demokrasi di indonesia. Sekarang demokrasi yang berjalan di indonesia sedang menghadapi masalah yang berat yaitu berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bisa berdampak pada pemilu 2024 dan demokrasi, masyarakat akan menjadi semakin apatis atas diputuskan pemerintahan apatisisme yang sedang berjalan saat ini seakan menjadi tameng pemisahan antara masyarakat dan pemerintahan yang seakan berjalan masing-masing (Djati, 2014).

Krisis kepercayaan antara rakyat dan politisi di indonesia semakin memprihatinkan dan menjadi tantangan serius bagi demokrasi di negara ini, salah satu penyebab utama dari krisis kepercayaan ini adalah kinerja buruk partai politik, banyak politisi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya daripada memperjuangkan aspirasi rakyat, kasus korupsi yang melibatkan kader partai, seperti yang terjadi pada beberapa anggota DPR dan kepala daerah, semakin memperburuk citra partai politik di mata masyarakat (Prastiasa et al., 2024).

Masyarakat merasa dikhianati ketika janji-janji kampanye yang diucapkan selama pemilihan umum tidak ditepati setelah mereka terpilih, hal ini menciptakan kesan bahwa politisi hanya mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi, bukan untuk melayani rakyat, selain itu permasalahan internal dalam partai politik juga menjadi faktor utama dalam kepercayaan (Prastiasa et al., 2024).

Pemilu 2024 menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia yang saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan politisi. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan karena banyak politisi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok, ditambah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan kepala daerah. Janji-janji kampanye yang sering tidak ditepati hanya memperkuat kesan bahwa politisi lebih fokus mengejar kekuasaan daripada melayani rakyat. Hal ini membuat masyarakat semakin apatis dan menjauhkan hubungan antara rakyat dengan pemerintah, sehingga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi.

Kerentanan Sosial Ekonomi

Kerentanan sosial ekonomi adalah kondisi di mana individu, kelompok, atau komunitas berada dalam situasi yang membuat mereka mudah terdampak oleh perubahan atau krisis dalam aspek sosial dan ekonomi.

Fenomena kerentanan ekonomi sosial merujuk pada situasi atau kondisi di mana individu, kelompok, atau komunitas mengalami kesulitan dan ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat faktor-faktor sosial dan ekonomi, contohnya kemiskinan dan keterbatasan akses sumber daya, kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi seperti pengangguran dan krisis ekonomi, ketimpangan gender dan disabilitas dan lain-lain (Hayah & Dewi, 2020).

kerentanan sosial ekonomi terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tekanan sosial atau ekonomi, baik itu berupa bencana alam, krisis ekonomi, atau ketidaksetaraan struktural. Kebebasan untuk memilih dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat sangat penting dalam mengurangi kerentanan (Musa et al., 2021).

Kerentanan sosial ekonomi merujuk pada kondisi di mana individu, kelompok, atau komunitas kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi, seperti

kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses sumber daya, ketimpangan gender, atau disabilitas. Fenomena ini terjadi ketika mereka tidak mampu menghadapi tekanan seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau ketidaksetaraan struktural. Dalam konteks ini, kemampuan untuk membuat pilihan dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat menjadi sangat penting untuk mengurangi kerentanan. Mahasiswa perlu memahami bahwa mengatasi kerentanan sosial ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kebijakan yang adil, dan pemberdayaan komunitas untuk menciptakan keadilan sosial.

Peran Elite Politik

Peran elite politik dalam demokrasi yang merupakan salah satu faktor utama munculnya suatu krisis demokrasi, peran menjadi perhatian dalam dinamika politik dalam pembentukan kebijakan, penentu kebijakan, pengambil Keputusan dan pengontrol dalam sistem pemerintahan.

Fenomena peran elite politik dalam demokrasi adalah cara untuk menggambarkan bagaimana sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh, penguasa, atau dominasi mempengaruhi proses politik, kebijakan pemerintah Dan prosedur pemerintahan di Indonesia, elite politik sering kali mengambil bentuk oligarki, di mana akuntabilitas ditempatkan di segelintir individu atau kelompok tertentu (Harahap et al., 2023).

Elite politik di negara demokrasi menyoroti beberapa hal penting, salah satu strategi utama yang digunakan oleh kelas politik untuk mempengaruhi opini publik adalah pencitraan, proses ini melibatkan citra positif yang di sebut-sebut mampu mempengaruhi persepsi pemilih dalam konteks Pemilu, pencitraan dianggap sebagai puncak tahapan yang sangat penting bagi elite politik, selain elektabilitas, elite politik biasa menggunakan akses media memungkinkan mereka untuk memobilisasi masyarakat dan membentuk opini publik untuk lebih memperkuat legitimasi mereka (Chalik, 2017).

Fenomena peran elite politik dalam demokrasi menggambarkan bagaimana sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan memengaruhi proses politik, kebijakan pemerintah, dan prosedur pemerintahan. Di Indonesia, elite politik sering berwujud sebagai oligarki, di mana akuntabilitas hanya terpusat pada segelintir individu atau kelompok. Salah satu strategi utama yang mereka gunakan adalah pencitraan, yaitu membangun citra positif untuk memengaruhi persepsi pemilih, terutama dalam konteks Pemilu. Selain itu, akses media juga dimanfaatkan oleh elite politik untuk memobilisasi masyarakat dan membentuk opini publik demi memperkuat legitimasi mereka.

KESIMPULAN

Menurut penelitian dan analisis politik identitas dan politik agama dalam konteks pemilu di Indonesia telah menjadi hal yang umum terjadi, terutama saat menjelang pemilu dengan dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan populasi masyarakat. Praktik ini sering digunakan oleh para politisi untuk menjaga dukungan sekaligus menyoroti risiko polarisasi, konflik sosial, dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Pragmatisme masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap elite politik yang kerap mengutamakan kepentingan pribadi di atas aspirasi publik menjadi penyebab masalah ini. Oleh karena itu, pendidikan politik yang inklusif dan akses informasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menciptakan demokrasi yang lebih stabil dan sehat.

REFERENSI

- Amruddin, A. (2020). Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik Di Sulawesi-Selatan. *Jurnal Arajang*, 3(1), 30-42.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

- Djati, W. R. (2014). Revivalisme kekuatan familisme dalam Demokrasi: dinasti politik di aras lokal. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 18(2), 72–100.
- Fachrudin, A. (2019). *Paradoks Pemilu Serentak 2019 Catatan dari Luar Bilik Suara*. Pustaka Imtak.
- Fajar, W. N. (2014). Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Khazanah Pendidikan*, 6(2).
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149–2160.
- Hayah, Z., & Dewi, S. P. (2020). Kajian Kerentanan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Tembalang Terkait Proses Studentifikasi Di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang. *Jurnal Riptek*, 14(1), 34–43.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share Social Work Journal*, 6(2), 181612.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 37.
- Martha Arry Bainus Dudi Heryadi, J. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori Dan Realita (Studi Kasus: Indonesia). *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 4.
- Maruapey, H., Andani, H., Nursahwa, S., Sa'diah, H., & Paujiah, N. S. (2024). Aplikasi Peran Pendidikan Etika Politik Pada Fenomena Politik Identitas di Pemilu 2024. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(3).
- Musa, P., Suryadi, A., & Paramitha, R. R. (2021). Kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di perbatasan Kabupaten Sambas menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 180–188.
- Perdana, A. P. (2023). Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(02), 225–238.
- Prastiasta, F. R., Bahmiati, S., Putri, A. D., Nasiruddin, F. H., & Amir, D. R. (2024). Dominasi Kepentingan Politik Sempit Dan Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perwakilan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FPMIPA*, 2(1), 563–571.
- Sahalatua, A. P., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2018). *Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sahl, D. F., & Mauluddin, A. (2024). Elemen-elemen Politik sebagai Strategi Mengkapitalisasi Perilaku Pemilih dalam Kontestasi Pemilu Presiden tahun 2024 di Indonesia. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 6(1), 13–28.
- Suryadi, I., & Anwar, S. (2024). Realitas Virtual dan Polarisasi Agama: Menelaah Pengaruh Media Sosial di Indonesia. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 41–56.
- Wahyunengseh, R. D. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 29–40.
- Yunus, F. M., Yasin, T. H. M., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 121–137.